

PEMERINTAH KOTA
BALIKPAPAN



LAPORAN

AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)

2023



SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataa'la, karena atas rahmat dan karuniaNya kita dikaruniai kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2023.

Setiap tahunnya, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen kontrak kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan yang kemudian pertanggungjawabannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah. Penyusunan LKjIP sendiri berpedoman pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKjIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 yang disusun selain menjadi sarana pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada penyusunan LKjIP tahun berikutnya.

Balikpapan, Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri PAN & RB No. 53 Tahun 2014 merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja, penjelasan yang memadai tentang pencapaian kinerja yang diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Tujuan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 adalah :

"MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL"

Sedangkan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menggambarkan tercapainya tujuan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat

2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah

LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perjanjian Kinerja yang memuat perencanaan, pencapaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis, Indikator kinerja yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis, dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Renstra.

Sejauh ini usaha usaha yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berupa :

1. Pelaksanaan Pembinaan kepada Instansi Terkait dan Pihak Ketiga yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam rangka Penertiban, Pengendalian Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi kepada Instansi Terkait berkaitan dengan kesepahaman dan legalitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.
3. Menerbitkan kebijakan kebijakan dalam rangka memberikan petunjuk dan arahan terkait tata cara pelaksanaan yang jelas terhadap pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Daerah.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2021 – 2026. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Balikpapan telah ditetapkan 1 Tujuan, 3 Sasaran dan 3 Indikator Sasaran. Namun di tahun 2023 telah diterbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 900/0157/Keu Tertanggal 23 Desember 2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 digambarkan perubahan jumlah Indikator Sasaran Strategis menjadi 7 butir sasaran Strategis. Capaian indikator sasaran dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran dari Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat" dengan rata-rata capaian dari 3 indikator "Skor LPPD Kota Balikpapan", "Presentase kerjasama yang ditindaklanjuti" dan "Presentase produk kukum yang difasilitasi dan di harmonisasi" sebesar 118,09% atau Kriteria Sangat Tinggi;
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah

Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan” dengan rata-rata capaian dari 3 Indikator “Nilai inflasi daerah”, “Nilai indeks tata kelola pengadaan”, dan “Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan” sebesar 93,41% atau Kriteria Sangat Tinggi;

3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan Indikator “nilai SAKIP Sekretariat Daerah” capaian sebesar 96.88% atau kategori Sangat Tinggi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 dengan nilai rata-rata 104,48% atau dengan kriteria Sangat Tinggi.

Dalam pelaksanaan upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan Sekretariat Daerah selama TA 2023 tentunya ditemui kendala kendala seperti :

1. Indikator kinerja belum tersusun sesuai kriteria ukuran keberhasilan yang baik (SMART).
2. Aktivitas Kota Balikpapan yang menjadi pusat kegiatan strategis nasional dan menjadi Kota Penyangga Ibu Kota Nusantara sehingga mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk yang masuk ke Kalimantan Timur sehingga terjadi tingginya permintaan terhadap komoditas Barang dan Jasa yang mempengaruhi iklim Inflasi Kota Balikpapan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi juga telah diambil, beberapa diantaranya berupa :

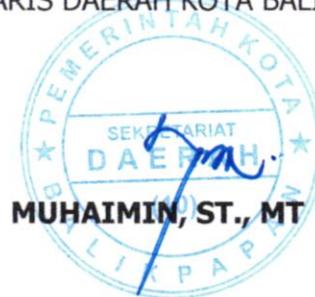
1. Dilakukan revisi/perbaikan atas indikator tujuan/sasaran pada Tujuan dan Sasaran Renstra berupa Perjanjian Kinerja Perubahan dan Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2023 yang bersesuaian dengan kriteria ukuran keberhasilan yang baik (SMART).
2. Penyajian pelaporan kinerja terutama mengenai kedalaman analisis kinerja dan penyajian akuntabilitas anggaran serta tingkat akurasi data sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan (feedback) bagi perbaikan pencapaian kinerja untuk kedepannya melalui pendampingan dan desk penyusunan laporan kinerja.
3. Pelaksanaan identifikasi permasalahan dan koordinasi bersama antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan TPID Kota Balikpapan berupa pelaksanaan high level meeting TPID, inspeksi pasar dan kawasan pertokoan, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (PGM) serentak di Kota Balikpapan.
4. Peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka meningkatkan keahlian melalui program pelatihan, bimbingan teknis dan uji kompetensi. Seperti pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bagi

Bidang Hukum atau Sosialisasi Penggunaan LPSE Kota Balikpapan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan hasil kerja sama segenap jajaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk tahun 2024, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Balikpapan, Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Isu Strategis)	5
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	21
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	29
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	33
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	35
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	38
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan mengacu pada SPM / Standar Nasional / Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	39
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	42
3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
3.2.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	60
3.3 Realisasi Anggaran	69
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	75

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Isi Tabel	Hal
1.1	Daftar Aparatur PNS dan Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023	5
2.1	Perencanaan Strategis Setda Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026	11
2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran	13
2.3	Indikator Kinerja Utama 2021 - 2026	21
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
2.5	Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	24
2.6	Target Belanja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023	27
2.7	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis	27
3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022	29
3.2	Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022	30
3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	33
3.5	Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2026 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	36
3.6	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 – 2026	38
3.7	Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada SPM/Standar Nasional/International (<i>Benchmark</i> Kinerja)	40
3.8	Ikstisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023	43
3.9	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	50
3.10	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menurut Tingkat Pendidikan	51
3.11	Jumlah Aset yang Dimiliki dan Tidak Dipakai	52
3.12	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	54
3.13	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	61
3.14	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023	69

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berisikan tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan didalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), penjelasan atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan selaku unsur penunjang pemerintahan daerah, dituntut agar selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan Kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran dan

fungsi Sekretariat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah:

- a. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Wali Kota Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota Balikpapan di Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2023;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dimasa yang akan datang.

I.4 GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan ditunjang dengan uraian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Tata Pemerintahan membawahkan;
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
 - a) Substansi Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Otonomi Daerah;
 - b) Subbagian Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Subbagian Ketenteraman, Ketertiban dan Kemasyarakatan.
 2. Bagian Kerjasama dan Perkotaan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
 - a) Substansi Kerjasama Daerah;
 - b) Substansi Administrasi Wilayah;
 - c) Substansi Manajemen Perkotaan.
 3. Bagian Hukum, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
 - a) Substansi Bantuan Hukum;
 - b) Substansi Peraturan Perundang-undangan;
 - c) Substansi Dokumentasi Hukum.
 4. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Substansi Dokumentasi Pimpinan;
 - c) Substansi Humas Pimpinan.
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan;
 1. Bagian Perekonomian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
 - a) Substansi Produksi Daerah;
 - b) Substansi Sarana dan Prasarana Perekonomian;
 - c) Substansi Pengembangan Perekonomian Daerah.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
 - a) Substansi Program Kerja;
 - b) Substansi Pengendalian;
 - c) Substansi Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Substansi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - b) Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan

- substansi:
- a) Substansi Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Substansi Kepemudaan, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Substansi Sosial dan Kesehatan.
- d. Asisten Administrasi Umum membawahkan ;
- 1. Bagian Organisasi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
 - a) Substansi Kelembagaan;
 - b) Substansi Tatalaksana dan Pembinaan Pelayanan Publik;
 - c) Substansi Pengembangan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja.
 - 2. Bagian Keuangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
 - a) Substansi Analisa Keuangan dan Perencanaan Anggaran;
 - b) Substansi Perbendaharaan;
 - c) Substansi Pembukuan dan Pelaporan Keuangan.
 - 3. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
 - a) Substansi Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Substansi Rumah Tangga;
 - c) Substansi Perlengkapan.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut



Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan data Simpeg Tahun 2023 sebanyak 128 orang dan Non PNS sebanyak 88 Orang.

Tabel 1.1
Daftar Aparatur PNS dan NON PNS
Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki Laki	Prem puan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana /D4	Dipl	SLTA	SLTP	SD
SEKRETARIS DAERAH	1		1				1					
ASISTEN	2		2				2					
STAF AHLI	1	1	2				2					
KABAG	6	4	10				5	5				
KASUBAG	1	1		2			1	1				
JFT	14	21		35			1	33		1		
PELAKSANA	44	29	2	40	29	2	3	21	7	36	4	2
Jlh PNS	69	56	17	77	29	2	15	60	7	37	4	2
Jlh NABAN/THL	45	25						26	9	30	4	1
Jlh PNS + NABAN/THL	114	81	17	77	29	2	15	86	16	67	8	3
Jumlah	195											

Sumber : Bezzeting Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2023

I.5 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 telah merumuskan isu strategis yang didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang disinkronkan dengan visi, misi dan program unggulan Kepala Daerah terpilih. Adapun isu strategis dalam JMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023 terfokus pada:

- 1) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga kerja;
- 2) Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal;
- 3) Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah;
- 4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 5) Pemerintahan yang profesional dan akuntabel;
- 6) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018.

Terkait dengan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut, Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif agar tujuan pembangunan dapat dicapai sesuai dengan target yang sudah direncanakan.

Menganalisis perkembangan situasi dan kondisi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Aspek-aspek strategis yang diemban Sekretariat Daerah Kota Balikpapan meliputi :

1. Adanya keselarasan kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan otonomi daerah;
2. Optimalisasi koordinasi di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
3. Berfungsinya mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Adanya sistem pelayanan yang mudah, aman, cepat, efisien, ekonomis, adil, transparan dan tepat sasaran;
5. Tersedianya aparatur yang profesional untuk mendorong meningkatkan kinerja, transparan dan persaingan yang sehat.

Isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan tugas dan fungsinya yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan meliputi :

1. Terbitnya kebijakan penyetaraan bagi pegawai eselon IV ke dalam jabatan fungsional yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional.
2. Tuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009.
3. Perlunya administrasi perencanaan penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
4. Adanya tuntutan perbaikan sistem akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan melalui perbaikan SAKIP.
5. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan produk hukum yang lebih tinggi.
6. Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan, manajemen pengadaan barang jasa perangkat daerah.
7. Perlunya perbaikan sistem pengelolaan tata kelola kearsipan dan pengelolaan aset dilingkungan Sekretariat Daerah.
8. Perlunya peningkatan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola pengadaan barang jasa sesuai ketentuan.
9. Perlunya peningkatan koordinasi dan penguatan regulasi dalam rangka peningkatan struktur perekonomian daerah dan peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD.
10. Perbaikan manajemen layanan penunjang internal berupa sarana prasarana kerja.
11. Perlunya penguatan regulasi, sistem monitoring dan Evaluasi dan pengawasan serta tata kelola terhadap penyaluran hibah bansos.

I.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Pokok Bahasan didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perjanjian Kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang secara garis besar memuat perencanaan, pencapaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis, Indikator kinerja yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis, dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Renstra.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2023 sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Bagian ini memuat dasar hukum kewajiban pembuatan Laporan Kinerja, menguraikan tentang apa yang sedang dikerjakan oleh Perangkat Daerah dan pengantar terhadap keseluruhan isi laporan. Jika diperlukan dapat mengungkapkan harapan untuk perbaikan di masa mendatang.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan mengenai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta sejauh mana usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Beberapa capaian kinerja penting dari indikator kinerja utama yang dapat menggambarkan kinerja Perangkat Daerah serta kinerja anggaran secara keseluruhan juga diuraikan secara ringkas. Selain itu perlu diuraikan tentang kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan dalam kurun waktu 1 tahun, serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu bab ini juga berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menjelaskan tentang rencana strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan perjanjian kinerja yang menjadi target laporan kinerja serta rencana anggaran yang digunakan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

1. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

2. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Berisi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Pada Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi dan Misi Walikota

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Balikpapan Terpilih. Visi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 adalah :

“TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN”

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari Visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Balikpapan merumuskan misi yang dapat menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

"Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel"

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis, berupa:

- a. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- c. Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah

TABEL 2.1

PERENCANAAN STRATEGIS SETDA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR 2026	
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	10,88	11,86	11,86	11,87	11,87	11,87	11,87	
		1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan rakyat, Hukum dan Kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	N/A	95,53%	98,03%	98,25%	98,47%	98,69%
		2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	3	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	31,79	31,89	32,00	32,10	32,20	32,30

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan pengertian Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Didalam mengukur Kinerja diperlukan Indikator Kinerja sebagai tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Sedangkan, hasil (*outcome*) merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Rencana Kerja Tahunan adalah rencana selama setahun yang disusun untuk menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran sekretariat daerah Kota Balikpapan dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan digambarkan sebagai berikut :

TABEL 2.2
PROGRAM/KEGIATAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN/SASARAN

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	32,00	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
								3		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
								4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
								2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
								6		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
								7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
										8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD
								3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
										10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
								4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
										14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
										15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
										16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
										17	Fasilitasi Kunjungan Tamu
										18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
										20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
										21	Pengadaan Mebel
										22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
										23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
										24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
								6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
									Pemerintahan Daerah	26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
								7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
										29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
										30	Pemeliharaan Mebel
										31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
										32	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
										33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
										34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
								8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
										36	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
										37	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
								9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
										39	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
										40	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
								10	Penataan Organisasi	41	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
										42	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
										43	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
										44	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
										45	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
								11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	46	Fasilitasi Keprotokolan
										47	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
										48	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
		2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola	Persentase Kebijakan Bagian	98,03%	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	12	Administrasi Tata Pemerintahan	49	Penataan Administrasi Pemerintahan

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN		
			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan, Kesejahteraan rakyat, Hukum dan Kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti		KESEJAHTERAAN RAKYAT			50	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
											51	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
										13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	52	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
												53	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
												54	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
										14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	55	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
												56	Fasilitasi Bantuan Hukum
												57	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
										15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	58	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
										59	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
		3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100%	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	60	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
										61	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
										62	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
								17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	63	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
										64	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
										65	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
								18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	66	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
										67	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
										68	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dengan Rekomendasi bahwa Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan agar tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai IKU dan Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kota Balikpapan atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, sehingga diterbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 900/0157/Keu Tertanggal 23 Desember 2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 yang digambarkan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Indikator ini menggambarkan Hasil Evaluasi terhadap integrasi Sistem Perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Bagian Keuangan
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	Nilai yang menggambarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat selama 1 Tahun	Hasil Evaluasi Kementrian Dalam Negeri	Laporan Hasil EPPD Kementrian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	Rasio yang menggambarkan jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Balikpapan terhadap jumlah keseluruhan kerjasama yang diajukan	$(\text{Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti} / \text{jumlah keseluruhan kerjasama}) \times 100\%$	MoU / Perjanjian Kerjasama	Bagian Kerjasama dan Perkotaan
		Presentase produk hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi	Rasio yang menggambarkan jumlah produk hukum yang disahkan terhadap produk hukum yang diajukan untuk dibuat	$(\text{Jumlah Produk Hukum disahkan} / \text{Total Produk hukum yang akan dibuat}) \times 100\%$	Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Indikator yang menggambarkan nilai kenaikan harga barang maupun jasa secara terus menerus dalam jangka waktu 1 tahun	Tingkat inflasi daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Bagian Perekonomian
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi SDM dan kelembagaan maupun dari sistem pengadaan	Hasil Evaluasi Oleh LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (KLPP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Rasio yang menggambarkan nilai capaian realisasi pembangunan fisik Pemerintah Kota Balikpapan	Hasil rata rata capaian realisasi fisik yang dilaporkan pada SIPERANGKO	Output Aplikasi SIPERANGKO	Bagian Administrasi Pembangunan

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dokumen perjanjian kinerja disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata sudah akan diperoleh.

Seiring dengan perkembangan APBD Kota Balikpapan dan hasil penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, bahwa perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2023 dapat pula mengalami perubahan seiring dengan perjanjian APBD Perubahan Tahun 2023.

Secara rinci, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	78,50
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2 Skor LPPD Kota Balikpapan	Poin	2,61
		3 Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	75%
		4 Presentase produk hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi	Persen	100%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	5 Nilai Inflasi Daerah	Persen	3±1%
		6 Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	58,00
		7 Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Persen	97%

Pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 187.100.838.566,- yang melalui mekanisme perubahan APBD menjadi Rp. 203.861.674.966,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 181.265.930.250,- (88,92%).

Adapun pendanaan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.5
PENDANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	143.717.363.416	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.000.000	APBDP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.630.368.775	APBDP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.405.368.775	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.460.000.000	APBDP
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.445.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.640.329.800	APBDP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.766.327.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.687.744.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.300.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	563.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	338.434.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.430.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.054.824.600	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.616.623.300	APBDP
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.975.350.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	4.734.520.000	
	Pengadaan Mebel	1.570.732.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.758.219.200	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.130.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.447.802.100	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.625.439.330	APBDP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.137.266.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.488.172.830	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.768.301.660	APBDP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.661.312.700	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.431.988.960	
	Pemeliharaan Mebel	150.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000	
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.120.527.851	APBDP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	242.909.000	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	399.357.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.478.261.851	
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.678.000.000	APBDP
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.558.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.000.000.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	120.000.000	
10	Penataan Organisasi	789.945.300	APBDP
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	140.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	256.349.800	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	74.999.700	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	181.990.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	136.605.100	
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.271.647.400	APBDP
	Fasilitasi Keprotokolan	670.000.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	712.499.400	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	889.148.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	56.249.166.250	
12	Administrasi Tata Pemerintahan	16.674.330.450	APBDP
	Penataan Administrasi Pemerintahan	11.520.779.000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2.690.212.350	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2.463.339.100	
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	31.297.465.400	APBDP
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	29.269.929.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.927.536.400	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	100.000.000	
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.488.345.800	APBDP
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	550.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	688.345.800	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1.250.000.000	
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	5.789.024.600	APBDP
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5.539.024.750	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	249.999.850	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.895.145.300	
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	805.998.800	APBDP
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	506.000.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	99.998.800	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	200.000.000	
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.714.146.500	APBDP
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	238.457.500	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	600.326.500	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	875.362.500	
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.375.000.000	APBDP
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	300.000.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	375.000.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	700.000.000	
	JUMLAH	203.861.494.966	

Nilai Realisasi Belanja terhadap target anggaran belanja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan digambarkan pada tabel berikut:

TABEL 2.6

TARGET BELANJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Belanja Langsung	203.861.494.966,-	181.265.930.250,-	88,92
	Jumlah	203.861.494.966,-	181.265.930.250,-	

Anggaran belanja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

TABEL 2.7

ALOKASI ANGGARAN BELANJA PER SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Prosentase	Pelaksana
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	143.717.363.416	70,50%	- Bagian Organisasi - Bagian Umum - Bagian Keuangan - Bagian Humas dan Protokol
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan daerah Bidang	56.249.166.250	27,59%	- Bagian Pemerintahan - Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Prosentase	Pelaksana
1	2	3	4	5
	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			- Bagian Hukum - Bagian Kerjasama
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3.895.145.300	1,91%	- Bagian Perekonomian - Bagian Adm Pembangunan - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2022, Sekretariat Daerah menunjukkan nilai sebesar 76,05 dengan Predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan implementasi terhadap AKIP pada Sekretariat Daerah sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja dalam rangka meningkatkan hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP di periode Berikutnya.

Adapun rincian dari hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 dijabarkan pada Tabel Berikut :

TABEL 3.1

**RINCIAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,06
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,78
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,10
4	Evaluasi Kinerja	25%	17,11
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	76,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, walaupun Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Sekretariat Daerah menunjukkan nilai sebesar 76,05 atau Predikat BB (Sangat Baik), namun dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan AKIP pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Matriks tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja dijabarkan pada tabel dibawah ini.

TABEL 3.2
MATRIKS TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	Penyusunan Pohon Kinerja agar mengidentifikasi kinerja urusan/sektor lain dan melibatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinerja	Pohon Kinerja telah dibuat dengan mengidentifikasi kinerja dan melibatkan instansi yang berkaitan dalam perencanaan kinerja
		Lakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian, serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, guna pemanfaatan hasil perencanaan kinerja secara berkesinambungan	Telah dilakukan survei internal kepada pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah berkaitan dengan tingkat pemahaman dan kepedulian, serta komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
		Lakukan revisi/perbaiki atas Indikator Tujuan/Sasaran pada Tujuan dan Sasaran Renstra, Sasaran Perjanjian Kinerja, dan Sasaran Kinerja Utama agar memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik (SMART)	Telah dibuat revisi/perbaiki atas indikator tujuan/sasaran pada Tujuan dan Sasaran Renstra berupa Perjanjian Kinerja Perubahan dan Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2023
2	Pengukuran Kinerja	Manfaatkan teknologi informasi (aplikasi) guna melakukan pengukuran kinerja yang efektif dan efisien	Telah dilakukan pemanfaatan teknologi melalui Aplikasi Pengukuran Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi (REAKSI)
		Lakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja, sehingga	Telah dilakukan survei internal kepada pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah berkaitan dengan tingkat pemahaman dan kepedulian pegawai atas hasil

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
		dapat dijadikan pedoman untuk menentukan strategi guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	pengukuran kinerja yang dilakukan
3	Pelaporan Kinerja	Ungkapkan secara keseluruhan upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk kinerja ke depannya di dalam Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah yang dibuat telah mencantumkan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja OPD pada Tahun Berjalan
		Lakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat kepedulian terhadap informasi dalam laporan kinerja, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk penentuan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Telah dilakukan survei internal kepada pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah berkaitan dengan tingkat kepedulian pegawai terhadap informasi dalam laporan kinerja
4	Evaluasi Kinerja	Tindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP sebelumnya oleh Inspektorat sesuai rekomendasi yang disampaikan, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal	Telah dilaksanakan pemenuhan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang diajukan melalui Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah
		Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan), namun perlu dilengkapi dengan kesepakatan mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti	Hasil evaluasi telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemenuhan tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 pada periode Tahun 2023 sebanyak 3 (Tiga) Sasaran Strategis dengan 7 (Tujuh) Butir Indikator Kinerja.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disajikan tata cara penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1.

Penjabaran penilaian capaian kinerja atas capaian indikator pada setiap sasaran strategis dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90.01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75.01% ≤ 90%	Tinggi
3	65.01% ≤ 75 %	Sedang
4	50.01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

Adanya analisis capaian kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Faktor pendukung utama yang mendukung upaya pencapaian kinerja di Sekretariat Daerah adalah ketersediaan dana untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target sasaran.

Selanjutnya untuk menilai capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi perlu dilakukan analisis capaian kinerja yang dijelaskan pada setiap sub bab berikut.

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026. Pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	78.50	76.05	96,88	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	Poin	2,61	3,16	120,94	Sangat Tinggi
		Presentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	75%	100%	133,33	Sangat Tinggi
		Presentase produk hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi	Persen	100%	100%	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan daerah Bidang Perekonomian	Nilai Inflasi Daerah	Persen	3±1%	3,60%	80,00	Tinggi
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	58,00	58,34	100,59	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Pembangunan	Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Persen	97%	96,64%	99,63	Sangat Tinggi

Seperti yang ditampilkan pada tabel diatas. capaian kinerja atas target sasaran strategis dari masing masing indikator adalah :

- a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target yang ditetapkan atas Indikator berupa Nilai SAKIP Sekretariat Daerah adalah sebesar 78.50 poin dan realisasi yang diperoleh adalah pada angka 76.05 poin atau Capaian sebesar **96,88%** dari target. Dari hasil pengukuran menunjukkan capaian melebihi target atau Kriteria **Sangat Tinggi**;
- b. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berisikan 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan 3 (tiga) target yang ditetapkan atas indikator yaitu :
 - 1) Skor LPPD Kota Balikpapan dengan target sebesar 2,61 poin dengan perolehan realisasi adalah sebesar 3,16 poin atau capaian sebesar **120.94%** dari target yang ditetapkan. Dari hasil pengukuran menunjukkan capaian melebihi target atau mendapat Kriteria **Sangat Tinggi**;
 - 2) Presentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan target capaian 75% dengan perolehan realisasi adalah sebesar 100% atau capaian sebesar **133,33%** dari target yang ditetapkan. Dari hasil pengukuran menunjukkan capaian melebihi target atau Kriteria **Sangat Tinggi**; dan
 - 3) Presentase produk hukum yang di fasilitasi dan di harmonisasi dengan target capaian 100% dengan perolehan realisasi adalah sebesar 100% atau capaian sebesar **100%** dari target yang ditetapkan. Dari hasil pengukuran menunjukkan capaian melebihi target atau Kriteria **Sangat Tinggi**.
- c. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan 3 (tiga) target yang ditetapkan atas indikator yaitu :

- 1) Nilai inflasi daerah dengan target yang ditetapkan atas indikator sebesar $3\pm 1\%$ dimana realisasi capaian kinerja sasaran adalah sebesar 3,60% sebesar **80,00%**. Dari hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja atas target sasaran kinerja adalah mencapai atau lebih besar dari target atau predikat Kriteria **Tinggi**;
- 2) Nilai indeks tata kelola pengadaan dengan target yang ditetapkan atas indikator sebesar 58,00 poin dimana realisasi capaian kinerja sasaran adalah sebesar 58,34 poin atau capaian kinerja sebesar **100,59%**. Dari hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja atas target sasaran kinerja adalah mencapai atau lebih besar dari target dengan predikat Kriteria **Sangat Tinggi**; dan
- 3) Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan dengan target yang ditetapkan atas indikator sebesar 97% dimana realisasi capaian kinerja sasaran adalah sebesar 96,64% atau capaian kinerja sebesar **99,63%**. Dari hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja atas target sasaran kinerja adalah belum mencapai seratus persen mencapai target namun memenuhi predikat Kriteria **Sangat Tinggi**.

Rata-rata keberhasilan capaian keseluruhan kinerja atas target dari Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebesar **121,45%** yang berarti kriteria penilaian realisasi kinerja **Sangat Tinggi**. Hal ini menggambarkan, secara umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selanjutnya Analisis atas Realisasi dan Capaian Kinerja pada setiap sasaran dan indikator kinerja pada tahun 2023 terhadap Realisasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

TABEL 3.5
Realisasi Kinerja Tahun 2022-2026
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2023
					2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	$11 = (7-6)/5 \times 100\%$
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	77,67	75,71	76,05	0,45%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	Poin	2,61	2,51	3,16	25,89%
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	75%	95,65 %	100%	4,55%
		Presentase produk hukum yang di fasilitasi dan di harmonisasi	Persen	100%	100%	100%	0%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Prekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Persen	2,28%	0,20%	3,60%	1.700%
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	46,58	43,10	58,00	34,57%
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Persen	N/A	95,74 %	96,64 %	0,94%

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa tahun 2023 yang merupakan tahun kedua pengukuran realisasi kinerja dari Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2021-2026 mengalami perubahan baik pada sasaran strategis

maupun indikator kinerja Sekretariat Daerah sehingga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dibandingkan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan sasaran strategis yang berpengaruh terhadap perbedaan indikator capaian kinerja yang digunakan pada Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026.

Penjabaran hasil analisa dari masing masing Capaian Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap Capaian pada tahun sebelumnya (Tahun 2022) dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator : Terjadi peningkatan sebesar 0,45% dari poin hasil capaian kinerja dari sebelumnya senilai 75,71 poin pada tahun 2022 meningkat menjadi 76,05 Poin pada tahun 2023.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Indikator : a. Capaian pada indikator kinerja Skor LPPD Kota Balikpapan mendapatkan nilai 3,16 poin, Skor LPPD tersebut merupakan hasil penilaian LPPD Tahun 2022 yang diumumkan di tahun 2023. Nilai ini mengalami peningkatan dari perolehan Skor LPPD Kota Balikpapan tahun 2022 di angka 2,51 Poin dengan presentase kenaikan sebesar 25,89%.

b. Indikator Kinerja Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti mencapai 100%, nilai ini meningkat dari persentase capaian kerjasama ditahun 2022 yang sebelumnya mencapai 95,65% dengan persentase kenaikan sebesar 4,55%.

c. Indikator Kinerja Presentase produk hukum yang di fasilitasi dan di harmonisasi juga mencapai 100% dan tidak mengalami peningkatan atau sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Indikator : a. Capaian pada indikator kinerja Nilai Inflasi Daerah meningkat menjadi 3,60% daripada tahun sebelumnya yang hanya berkisar diangka 0,20% Hal ini menggambarkan terjadi peningkatan yang tajam terhadap kondisi inflasi di kota Balikpapan hingga mencapai 1.700%.

- b. Indikator Kinerja Nilai Indkes Tata Kelola Pengadaan mengalami peningkatan di tahun 2023 mencapai angka 58,00 Poin atau kategori cukup, nilai ini meningkat dari capaian Indeks tata kelola Pengadaan Pemerintah Kota Balikpapan ditahun 2022 yang sebelumnya berada di Poin 43,10. Hal ini menggambarkan persentase kenaikan sebesar 34,57%.
- c. Indikator Kinerja Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan di tahun 2023 mencapai angka 96,64%, nilai ini meningkat dari persentase capaian rata rata realisasi fisik ditahun 2022 yang sebelumnya mencapai 95,74%. Hal ini menggambarkan persentase kenaikan sebesar 0,94%.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Analisa berikutnya mengukur perbandingan capaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 seperti pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.6

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{5}{6} \times 100$
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	76,05	N/A	N/A
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	Poin	3,16	N/A	N/A
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100%	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		Presentase produk hukum yang di fasilitasi dan di harmonisasi	Persen	100%	N/A	N/A
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Prekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Persen	3,60%	N/A	N/A
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	58,00	N/A	N/A
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Persen	96,64%	N/A	N/A

Dikarenakan telah dilakukan revisi/perbaikan atas Indikator Tujuan/Sasaran Strategis, Sasaran Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama sesuai tindak lanjut atas rekomendasi pengefektifan penerapan AKIP pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan oleh Inspektorat Kota Balikpapan, maka dari ketujuh Indikator pada 3 (tiga) Sasaran Strategis tidak dapat dibandingkan terhadap target akhir Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dikarenakan tidak terdapat kesesuaian antar Target Akhir Indikator Kinerja pada Dokumen Rencana Strategis terhadap Indikator Kinerja Utama pada Dokumen Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 900/0157/Keu tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ International (*Benchmark* Kinerja)

Sub bab ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2023 terhadap SPM/Standar Nasional/International (*Benchmark* Kinerja) yang digambarkan pada tabel dibawah ini.

TABEL 3.7

Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada SPM/Standar Nasional/International (*Benchmark Kinerja*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	76,05	-
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	Poin	3,16	-
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100%	-
		Presentase produk hukum yang di fasilitasi dan di harmonisasi	Persen	100%	-
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Prekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Persen	3,60%	2,61%
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	58,00	-
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Persen	96,64%	-

Tabel Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 terhadap Realisasi Capaian Nasional 2023 menunjukkan bahwa Sebagian Besar Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 atas Realisasi Capaian Nasional Tahun 2023 tidak dapat dilakukan perbandingan sebab :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah tidak dapat dilakukan persandingan sebab Nilai SAKIP digunakan sebagai pengukuran Kinerja untuk dilakukan perbaikan serta mendorong Instansi Pemerintah untuk melakukan Inovasi pada Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah

sehingga penilaian SAKIP hanya dilakukan pada Level Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah tidak pada Level Nasional.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Skor LPPD Kota Balikpapan di angka 3,16 poin juga tidak dapat dilakukan persandingan sebab LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah sehingga tidak terdapat capaian skor LPPD tingkat Nasional.
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti merupakan indikator terhadap pelaksanaan kerjasama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sehingga tidak dapat disandingkan terhadap capaian indikator Pelaksanaan Kerjasama Nasional dikarenakan Sasaran Strategis yang ditetapkan merupakan Sasaran yang ditetapkan berdasarkan urusan penunjang pemerintahan yang bukan berdasarkan pelaksanaan urusan wajib sehingga tidak terdapat SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*).
4. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Presentase produk hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi merupakan indikator yang menggambarkan rasio yang menggambarkan jumlah produk hukum yang disahkan terhadap produk hukum yang diajukan untuk dibuat melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah sehingga tidak dapat disandingkan terhadap capaian indikator jumlah produk hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi pada tingkat nasional dan juga Sasaran Strategis yang ditetapkan merupakan Sasaran yang ditetapkan berdasarkan urusan penunjang pemerintahan yang bukan berdasarkan pelaksanaan urusan wajib sehingga tidak terdapat SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*).
5. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan Indikator Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan tidak dapat dilakukan persandingan terhadap Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Nasional, sebab Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan merupakan penilaian terhadap indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia dan

kelembagaan, maupun dari segi pemanfaatan sistem pengadaan yang dinilai dalam Penilaian Reformasi Birokrasi sehingga hanya digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sehingga tidak terdapat Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan pada tingkat Nasional.

6. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan Indikator Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan tidak dapat dilakukan persandingan terhadap standar Nasional dikarenakan Sasaran Strategis yang ditetapkan merupakan Sasaran yang ditetapkan berdasarkan urusan penunjang pemerintahan yang bukan berdasarkan pelaksanaan urusan wajib sehingga tidak terdapat SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja).
7. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan Indikator Nilai Inflasi Daerah terdapat perbandingan dengan Nilai Inflasi Nasional, dimana Nilai Inflasi Nasional Tahun 2023 sebesar 2,61% sedangkan Nilai Inflasi Kota Balikpapan adalah sebesar 3,60% sehingga tergambar bahwa Nilai Inflasi Kota Balikpapan lebih besar daripada Nilai Inflasi Nasional sebesar 0,99%. Hal ini menggambarkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa di Kota Balikpapan jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang dan jasa Nasional.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam melaksanakan tujuan pencapaian target atas Sasaran Strategis Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab yang terbagi atas Faktor Pendorong Keberhasilan dan Faktor Penghambat. Pada tahap ini, diuraikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yang disajikan tabel sebagai berikut :

TABEL 3.8
Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
				Sangat Tinggi (90.01% ≤ 100%)	Tinggi (75.01% ≤ 90%)	Sedang (65.01% ≤ 75%)	Rendah (50.01% ≤ 65%)	Sangat Rendah (≤ 50%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	96,88	√				
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	120,94	√				
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	133,33	√				
		Presentase produk hukum yang di fasilitasi dan di harmonisasi	100%	√				
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	80,00		√			
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	100,59	√				
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	99,63	√				

Melalui pengukuran capaian kinerja yang digambarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pencapaian atas target kinerja selama tahun 2023 sudah memenuhi target Realisasi Kinerja yang ingin dipenuhi. Namun demikian, tetap saja masih terdapat beberapa faktor keberhasilan dan kegagalan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan keberhasilan pencapaian kinerja tahun berikutnya.

Adapun beberapa analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada Tabel 3.8 : Ikhtisar capaian kinerja Tahun 2023 di atas, tergambar bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah menunjukkan predikat **Sangat Tinggi** yaitu mempunyai dengan capaian kinerja 98,66% dengan realisasi kinerja sebesar 76,05 poin dari target kinerja yang ditetapkan yaitu 78,50 poin. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain:

- a. Peningkatan Hasil Evaluasi atas AKIP Sekretariat Daerah Kota pada Komponen Pengukuran Kinerja dan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- b. Peningkatan pada komponen Pengukuran Kinerja didalamnya termasuk telah terdapat IKU dan ukuran kinerja pada tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja dari atasan, pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, sebagian data kinerja telah relevan dan mendukung target capaian kinerja, serta pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- c. Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal peningkatan Nilai Hasil Evaluasi dipengaruhi oleh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian besar telah ditindaklanjuti dan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja telah dilaksanakan.

Sementara beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kegagalan atau penurunan nilai capaian berupa:

- a. Indikator kinerja belum tersusun sesuai kriteria ukuran keberhasilan yang baik (SMART).
- b. Sebagian besar target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sebenarnya telah dicapai dengan baik namun dianggap masih belum mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

- c. Belum sepenuhnya informasi kinerja yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan.
- d. Laporan kinerja baru sebagian besar saja yang telah mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.

Beberapa upaya solusi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan Pohon Kinerja dengan identifikasi pada kinerja urusan organisasi dan melibatkan seluruh tim pengampu yang berkaitan dalam perencanaan kinerja.
 - b. Survei Internal terhadap pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah berkaitan dengan tingkat pemahaman dan kepedulian, serta komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang direncanakan, tingkat pemahaman dan kepedulian pegawai atas hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, serta tingkat kepedulian pegawai terhadap penggunaan informasi dalam laporan kinerja.
 - c. Dilakukan revisi/perbaikan atas indikator tujuan/sasaran pada Tujuan dan Sasaran Renstra berupa Perjanjian Kinerja Perubahan dan Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2023 yang bersesuaian dengan kriteria ukuran keberhasilan yang baik (SMART).
 - d. Penyajian pelaporan kinerja terutama mengenai kedalaman analisis kinerja dan penyajian akuntabilitas anggaran serta tingkat akurasi data sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan (feedback) bagi perbaikan pencapaian kinerja untuk kedepannya melalui pendampingan dan desk penyusunan laporan kinerja.
- 2) Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Melalui Tabel 3.8. Ikhtisar capaian kinerja Tahun 2023 di atas, dapat digambarkan bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat menunjukkan predikat **Sangat Tinggi** dengan beberapa capaian indikator seperti kinerja Skor LPPD Kota Balikpapan dengan capaian kinerja 120,94% dimana mendapatkan realisasi kinerja sebesar 3,16 poin lebih besar daripada target kinerja yang ditetapkan yaitu 2,61 poin, demikian halnya dengan capaian indikator presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti yang memperoleh realisasi kinerja mencapai 100% lebih besar daripada target kinerja 75% sehingga mendapatkan rasio capaian realisasi mencapai 133,33%, dan pada Indikator Kinerja Presentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi yang rasio capaian kinerjanya 100% dikarenakan antara target dan capaian realisasi kinerja sama sama di angka 100%. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat antara lain:

- a. Sebagian besar capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan terhadap setiap indikator kinerjanya dapat memenuhi target sehingga memperoleh predikat "sangat tinggi". Utamanya pengaruh daripada capaian nilai sakin kota Balikpapan, peningkatan capaian indeks pengelolaan keuangan daerah, pemenuhan indeks SPBE, maturitas SPIP, indeks sistem merit, peningkatan indeks kepuasan masyarakat, indeks pendidikan dan kesehatan, capaian indeks pembangunan literasi masyarakat, indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan, indeks warisan budaya, pemenuhan anggaran responsif gender (ARG), indeks pembangunan infrastruktur, permukiman layak huni, indeks kualitas lingkungan hidup, persentase pemanfaatan ruang, indeks risiko bencana dan ketentraman ketertiban, peningkatan pertumbuhan umkm, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan, peningkatan nilai realisasi investasi daerah, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan internasional, meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, dan peningkatan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi yang intens antara pihak Pemerintah Kota Balikpapan dengan instansi vertikal seperti Kementrian dan lembaga juga organisasi masyarakat maupun dengan sesama Pemerintah Daerah perihal tindaklanjut dari pembuatan MOU Pelaksanaan Kerjasama sehingga dapat

dilakukan percepatan dalam menghasilkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak Eksternal.

- c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, serta kepada pihak Eksternal seperti Kanwilkemenkumham dan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan bidang Hukum sehingga dapat mempercepat pelaksanaan Harmonisasi Produk Hukum Daerah.

Sementara hal hal yang dapat menjadi faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja antara lain :

- a. Masih kurangnya Kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah yang mempengaruhi capaian derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan kinerja yang efektif sehingga mempengaruhi capaian skor LPPD Kota Balikpapan.
- b. Adanya pengajuan pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan menjelang akhir tahun berjalan sehingga tidak mencukupi waktu untuk ditindaklanjutinya pelaksanaan kerjasama berupa pembuatan dokumen kerjasama di tahun yang sama.
- c. Belum terpenuhi secara maksimal Jumlah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan terutama pada keahlian khusus seperti keahlian di Bidang Hukum.

Beberapa upaya solusi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Penguatan sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah termasuk penyusunan peraturan mengenai pengelolaan PAD (termasuk PDRD) sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- b. Modernisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM daerah, termasuk modernisasi proses pemungutan pajak (seperti penggunaan sistem teknologi informasi dan pembaruan data wajib pajak secara elektronik).
- c. Peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka meningkatkan keahlian melalui program pelatihan, bimbingan teknis dan uji kompetensi. Seperti pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bagi Bidang Hukum atau Sosialisasi Penggunaan LPSE Kota Balikpapan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

- d. Standard Operational Procedure (SOP) berupa kalender jadwal pengajuan teknis kerjasama daerah pada setiap rencana pelaksanaan kerjasama daerah sehingga dapat mengefisienkan waktu dan meminimalisir keterlambatan tindaklanjut MOU Pelaksanaan Kerjasama.
- 3) Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pada Tabel 3.8. Ikhtisar capaian kinerja Tahun 2023 di atas, tergambar bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Perekonomian dan Pembangunan menunjukkan predikat **Sangat Tinggi** dengan beberapa capaian indikator seperti Nilai Inflasi Daerah dengan rasio capaian kinerja 80,00% dengan realisasinya sebesar 3,60% dimana target kinerja yang ditetapkan yaitu $3 \pm 1\%$, demikian halnya dengan capaian indikator Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memperoleh realisasi kinerja mencapai 58,34 poin lebih besar daripada target kinerja 58 poin sehingga mendapatkan rasio capaian realisasi mencapai 100,59%, dan pada Indikator Kinerja Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan yang rasio capaian kinerjanya 99,63% dimana realisasinya sebesar 96,64% dimana target kinerja yang ditetapkan yaitu 97,00%

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan antara lain:

- a. Sinergi bersama antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan dalam pemantauan dan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas di Kota Balikpapan utamanya bahan pokok dan pangan.
- b. Pemahaman pegawai dalam pemanfaatan Sistem Pengadaan Pemerintah berupa Aplikasi SiRUP, e-Purchasing, e-Tenderring dan lain lain utamanya oleh Pejabat Pengadaan Pemerintah dan Umumnya Para Pelaku Pengadaan barang dan Jasa dan Para Stakeholder terkait sehingga Proses Pengadaan Barang dan Jasa semakin berjalan mudah dan terpantau dengan baik.
- c. Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan baik fisik maupun non fisik pada tahun berjalan sehingga kendala kendala yang mungkin timbul selama tahun berjalan dapat segera dibahas dan diberikan solusi secepatnya.

- d. Terdapat juknis yang jelas dari Lembaga yang lebih tinggi terkait tata cara pelaksanaan dan penyusunan kebijakan di level pemerintah Kota sehingga kebijakan yang dibuat memiliki dasar penyusunan dan kekuatan hukum yang jelas.

Sementara hal hal yang menjadi faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja antara lain :

- a. Potensi El Nino yang berkepanjangan di Kota Balikpapan yang mengakibatkan menurunnya produktivitas pangan yang berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan dan jasa tersebut.
- b. Aktivitas Kota Balikpapan yang menjadi pusat kegiatan strategis nasional dan menjadi Kota Penyangga Ibu Kota Nusantara sehingga mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk yang masuk ke Kalimantan Timur sehingga terjadi tingginya permintaan terhadap komoditas Barang dan Jasa.
- c. Meningkatnya tarif jasa transportasi dari dan ke Kota Balikpapan akibat penyesuaian harga BBM Non Subsidi sehingga ikut mempengaruhi kenaikan harga pada Barang Komoditas Utama.
- d. Proses mutasi pegawai yang mengakibatkan perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi berulang kepada pengadministrasi kegiatan agar pemahaman dalam hal penggunaan aplikasi pengadaan pemerintah dapat berjalan dengan baik.
- e. Terdapat beberapa target kegiatan yang membutuhkan perizinan dari level pemerintahan yang lebih tinggi sehingga menghambat pelaksanaan proses percepatan pelaksanaan pembangunan apabila tidak dilakukan monitoring secara berkala terhadap proses perizinannya.

Beberapa upaya solusi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan identifikasi permasalahan dan koordinasi bersama antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan TPID Kota Balikpapan berupa pelaksanaan high level meeting TPID, inspeksi pasar dan kawasan pertokoan, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (PGM) serentak di Kota Balikpapan.

- b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pengendalian Berkala terhadap monitoring proses pekerjaan fisik maupun keuangan yang tujuannya agar dapat segera beradaptasi apabila pada pelaksanaan terjadi hal yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.
- c. Sosialisasi rutin terhadap para pengampu kebijakan dan pelaksana teknis kegiatan terkait peraturan dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sub bab ini memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang dimiliki. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat didalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 396 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan saat ini didukung oleh 125 orang pegawai ASN.

Tabel 3.9

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki Laki	Prempuan
1	SEKRETARIS DAERAH	1	
2	ASISTEN	2	
3	STAF AHLI	1	1
4	KABAG	6	4
5	KASUBAG	1	1
6	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	14	21

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki Laki	Prempuan
7	PELAKSANA	44	29
	JUMLAH PNS	69	56

Sumber : Bezzeting Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2023

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/tabel berikut :

Tabel 3.10
Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/Keadaan
1	SD/SMP/SMA	161	43
2	D3	26	7
3	D4/S1	139	60
4	S2	70	15
	JUMLAH PNS	396	125

Sumber : Bezzeting Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2023

Dari gambaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 berjumlah 60 orang atau 48% dari target, kemudian diikuti oleh pendidikan SD/SMP/SMA berjumlah 43 orang atau 34,4% dari target, pendidikan S2 berjumlah 15 orang atau 12% dari target, dan dengan kualifikasi pendidikan D3 sebanyak 7 pegawai atau sebesar 5,6%. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan memaksimalkan beban tugas kepada personil yang tersedia dan mengusulkan penambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan berupa perekrutan tenaga PNS baru maupun melalui pengangkatan PPPK Pemerintah.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sarana prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.	Unit	Rp.	
1	Tanah	1	388.915.453.857,00	0		Kondisi Baik
2	Peralatan dan Mesin	1	115.571.473.156,57	0		Kondisi Baik
3	Gedung dan Bangunan	1	43.576.268.462,67	0		Kondisi Baik
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	14.404.119.876,00	0		Kondisi Baik
5	Aset Tetap Lainnya	1	89.727.300,00	0		Kondisi Baik
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1	0,00	0		Kondisi Baik
7	Aset Tidak Berwujud	1	2.250.002.804,00	0		Kondisi Baik
8	Aset Lain Lain	1	521.871.700,00	0		Kondisi Baik
	JUMLAH	8	565.328.917.156,24	0	0,-	

Sumber : SIMDA BMD Sekretariat Daerah Tahun 2023

3. Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran

Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

TABEL 3.12
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2023
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	78.50	76,05	96,88	143.717.183.416	128.329.230.753	89,29%	Belum Efisien
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	2,61	3,16	120,94	47.971.795.850	42.453.888.148	88,50%	26,83%
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	75%	100%	133,33	5.789.024.600	5.476.126.162	94,59%	29,05%
		Presentase produk hukum yang difasilitasi dan di harmonisasi	100%	100%	100	2.488.345.800	2.116.124.513	85,04%	14,96%
3	Meningkatnya Kinerja	Nilai Inflasi Daerah	3±1%	3,60%	80,00	805.998.800	494.530.802	61,36%	Belum Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	58,00	58,34	100,59	1.375.000.000	1.190.116.987	86,55%	13,95%
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	97,00%	96,64%	99,63	1.714.146.500	1.205.912.885	70,35%	Belum Efisien

Seperti yang terlihat pada tabel 3.12 diatas perihal Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun realisasi anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan bahkan melampaui capaian target kinerja yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2023 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mencukupi dengan capaian kinerja 96.88% dan capaian penyerapan anggaran 89.29%, namun belum mencapai target efisiensi kinerja seperti yang diharapkan.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya efisiensi kinerja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya capaian indikator kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terjadi pada beberapa program/kegiatan/subkegiatan sebagai berikut :

- a) Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, terjadi tidak efisiensi dikarenakan dikurangnya pelaksanaan rapat rapat internal sehingga terjadi anggaran belanja makanan dan minuman rapat tidak terserap hingga 50%.
- b) Penggunaan Aplikasi eoffice sebagai alternatif kegiatan surat menyurat secara digital seharusnya digunakan sebagai pemanfaatan teknologi informasi untuk pencapaian kinerja yang lebih efisien namun belum digunakan dan dianggarkan secara efektif dan efisien.

- c) Tidak terlaksananya rencana pengadaan aset tak berwujud sepanjang tahun berjalan.
 - d) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Pelaksanaan pembinaan RB pada area manajemen perubahan dan penguatan akuntabilitas pada Kegiatan Penataan Organisasi dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi tidak terlaksana sehingga walaupun capaian kinerja mencapai 100% terjadi efisiensi belanja anggaran yang tidak digunakan hingga diatas 70% dari target anggaran.
 - e) Pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikarenakan sampai akhir tahun tidak ada Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga terjadi efisiensi anggaran hanya digunakan untuk belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah namun mempengaruhi pada Target Capaian Kinerjanya.
- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah mencukupi dengan rata rata capaian kinerja 118.09% dan rata rata capaian penyerapan anggaran 89.38% sehingga tingkat rata rata efisiensi anggaran sebesar 23.61%.
- Beberapa efisiensi diperoleh dengan dipengaruhi beberapa faktor dari masing masing Indikator Kinerja. Efisiensi pada Indikator Kinerja Skor LPPD Kota Balikpapan mencapai 26,83% yang dipengaruhi oleh beberapa kegiatan
- a) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan Sub Kegiatan pelaksanaan Otonomi Daerah terjadi efisiensi disebabkan beberapa kegiatan seperti Aktivitas Lapangan dapat diminimalisir sehingga menghemat beberapa pelaksanaan belanja seperti belanja ATK, Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan dan belanja Perjalanan dinas Luar Kota.

- b) Pada sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan pada kegiatan pelaksanaan toponimi dan pemetaan wilayah, belanja souvenir/cendera mata belum dapat dilakukan.

Indikator Kinerja Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti mencapai efisiensi anggaran sebesar 29,05% yang dipengaruhi oleh terpenuhinya capaian kinerja yang ditargetkan dengan efisiensi anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri hingga 69,10% dan efisiensi anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri mencapai 95,75%.

Indikator Kinerja Presentase Produk Hukum yang difasilitasi dan ditindaklanjuti mencapai efisiensi anggaran sebesar 14,96% yang dipengaruhi oleh beberapa kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

- a) Seluruh Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitas Bantuan Hukum, dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum pada Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum dikarenakan meningkatnya jumlah produk hukum yang diajukan untuk difasilitasi oleh OPD serta peningkatan jumlah kasus yang ditangani oleh Bagian Hukum.
- b) Pada Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum dengan Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum terjadi efisiensi belanja yang disebabkan terdapat belanja administrasi sidang yang tidak digunakan sepenuhnya karena mengikuti jadwal berlangsungnya persidangan, dan belanja pelaksanaan kursus yang pada perencanaan dilaksanakan secara offline namun dapat diefisiensi melalui pelaksanaan kursus secara online.
- c) Pada Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum dengan Sub Kegiatan Pendokumentasian produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum terjadi pelaksanaan kegiatan yang melebihi target capaian disebabkan Kegiatan sosialisasi produk hukum yang direncanakan dilaksanakan per Kecamatan terealisasi pelaksanaan kegiatannya hingga pada tingkat Kelurahan

sehingga terjadi peningkatan Capaian Kinerja hingga mencapai 137.15% dari target kinerja.

- 3) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan hanya mencukupi dengan rata rata capaian kinerja 93,41% dan rata rata capaian penyerapan anggaran 72.75% sehingga belum mencapai target efisiensi anggaran yang diharapkan.

Efisiensi dan ketidakefisienan atas sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dipengaruhi beberapa faktor dari masing masing Indikator Kinerja.

- a) Belum tercapai efisiensi pada Indikator Kinerja Nilai Inflasi Daerah dikarenakan capaian kinerjanya dipengaruhi oleh adanya kegiatan kajian di Bagian Perekonomian yang batal dilaksanakan sebab kegiatan kajian tersebut telah dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah lain sehingga pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD terjadi tidak direalisasinya belanja jasa tenaga ahli hingga 84%, serta faktor faktor dari luar yang mempengaruhi kenaikan inflasi di Kota Balikpapan seperti kejadian El Nino yang berkepanjangan di Kota Balikpapan yang mengakibatkan menurunnya produktivitas pangan yang berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan dan jasa serta aktivitas di Kota Balikpapan yang menjadi pusat kegiatan strategis nasional dan Kota Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga berakibat pada peningkatan jumlah penduduk yang masuk ke Kalimantan Timur sehingga terjadi tingginya permintaan terhadap komoditas Barang dan Jasa.
- b) Pada Indikator Kinerja Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan tercapai tingkat efisiensi 13,95% yang capaian kinerjanya dipengaruhi oleh efisiensi dalam hal pelaksanaan kegiatan

yang melebihi target pada Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dimana pada target kinerja pembinaan baik terhadap pelaku pengadaan maupun pembinaan internal kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang menjabat sebagai pengampu kegiatan yang sebelumnya ditargetkan rendah karena mempertimbangkan jumlah histori sebelumnya meningkat hingga capaian 753% dari yang ditargetkan akibat perubahan pada peraturan mengenai kewajiban pengadaan barang dan jasa melalui penggunaan E-Purchasing.

- c) Belum tercapainya efisiensi pada Indikator Kinerja Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan dipengaruhi oleh Belanja pada Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan terdapat Anggaran Belanja Kegiatan Coastal Road yang belum dapat terealisasi sepenuhnya dikarenakan hingga tahun 2023 masih menunggu proses perijinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.2.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pada sub bab ini menunjukkan analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tahun ini atas sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

TABEL 3.13

**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	96,88%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	96,63%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	96,88%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98,94%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91,26%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92,48%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,87%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,24%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,87%
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00%
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Presentase Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	100,00%
				Penataan Organisasi	IKM Layanan Penataan Organisasi	95,87%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	100,00%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	100,00%
		Skor LPPD Kota Balikpapan	120,94%	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	100,00%
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	111,11%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Presentase Produk Hukum yang difasilitasi dan di harmonisasi	100%	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100,00%
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	75%	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	121,36%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100,00%
		Nilai Inflasi Daerah	3±1%	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	97%	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	100,00%
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	58,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	110,66%

Hasil Pendataan terkait analisa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja disampaikan hal sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari sasaran strategis diatas diketahui bahwa rasio capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah tercapai sebesar 96.88%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah. Penataan Organisasi, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Adapun kegiatan yang berdampak pada belum tercapainya target kinerja di antaranya :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Adanya rekomendasi dari Inspektorat Kota Balikpapan terkait perlu disusun ulang dan perbaikan terhadap perumusan indikator kinerja atas sasaran strategis yang terindikasi belum memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals* (SMART) atau metode perumusan indikator kinerja yang baik.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Pengembangan terhadap Aplikasi SiPEMBELANJA di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sehingga proses pelaksanaan dan pemantauan administrasi keuangan semakin berjalan baik.

- c) Kegiatan Penataan Organisasi : *Issue* penambahan jumlah SDM Kepegawaian melalui skema pengangkatan tenaga PPPK Pemerintah yang mengakibatkan harus dilakukan perumusan ulang dan penataan kembali mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah.
 - d) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan : Keterbatasan Jumlah Personil Keprotokolan dalam Kegiatan Pendampingan Kepala Daerah dalam menghadiri Kegiatan Koordinasi Kepala Daerah maupun acara-acara Pemerintahan lainnya.
- 2) Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pada Sasaran Strategis di atas, dinilai melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Skor LPPD Kota Balikpapan, Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti, dan Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi memenuhi rata-rata rasio capaian 118.09%. Indikator ini terlaksana melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dan Fasilitasi Kerjasama Daerah. Adapun faktor/kegiatan yang berdampak menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja di antaranya :

- a) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan : Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT RI dan Kegiatan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Penguatan sektor pemeliharaan titik kontrol wilayah Kota Balikpapan berupa pemenuhan dan pemeliharaan Tugu Tapal Batas Daerah.
- b) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat : Memfasilitasi keikutsertaan Khalifah Peserta MTQ Kota Balikpapan pada acara lomba MTQ Tingkat Kota dan Provinsi.
- c) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum : Penerbitan Produk Hukum Daerah berupa SK, Peraturan Daerah, dan

Peraturan Walikota dalam rangka menunjang legalitas hukum pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

- d) Fasilitasi Kerjasama Daerah : Melalui Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan Pemenuhan Kebutuhan Keikutsertaan Kepala Daerah dalam Acara Rapat Rapat Koordinasi Rutin Apeksi Kepala Daerah.

- 3) Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dinilai melalui 3 (tiga) indikator kinerja Nilai Inflasi Daerah, Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan, dan Presentase Rata Rata Capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan mencapai rata rata rasio capaian kinerja sebesar 93,41%. Indikator ini dipenuhi melalui Program Perekonomian dan Pembangunan dan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun kegiatan yang berdampak pada keberhasilan pencapaian target kinerja di antaranya :

- a) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian : Diadakan Seleksi Jabatan Pimpinan di Lingkungan Perusahaan Daerah Manuntung Sukses dan PDAM Tirta Manuntung Balikpapan, serta dilakukan Rapat Rapat Koordinasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan bersama Tim TPID Kota Balikpapan dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.
- b) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan : Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan APBD, DAK, dan Bankeu rutin serta pemenuhan kebutuhan data realisasi pembangunan organisasi perangkat daerah melalui Aplikasi SIPERANGKO dalam rangka memonitoring pekerjaan fisik dan realisasi keuangan pelaksanaan pembangunan Kota Balikpapan.
- c) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa : Rapat Koordinasi baik kepada pihak internal maupun pihak

penyedia terkait penginputan rencana pengadaan pada aplikasi SIRUP maupun rapat Pembahasan teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah termasuk Kegiatan Sosialisasi aturan pelaksanaan P3DN Pemerintah dan Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal teknis metode pelaksanaan dan kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan di Kota Balikpapan.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini digambarkan mengenai realisasi atas anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Serapan Anggaran Belanja Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2023 sebesar 88.92% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.14

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	143.717.183.416	128.329.230.753	89,29%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.000.000	85.363.227	73,59%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	14.904.938	49,68%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.000.000	10.411.859	57,84%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.000.000	17.278.039	95,99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	42.768.391	85,54%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.630.368.775	23.912.538.010	83,52%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.405.368.775	23.705.869.384	83,46%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175.000.000	164.195.542	93,83%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	17.940.186	89,70%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	24.532.898	81,78%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.460.000.000	796.263.150	54,54%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15.000.000	14.008.200	93,39%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.445.000.000	782.254.950	54,14%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.640.329.800	46.176.933.854	94,94%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000.000	490.972.425	98,19%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.766.327.000	2.604.853.265	94,16%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.687.744.200	1.390.240.779	82,37%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.300.000.000	15.993.964.035	98,12%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	563.000.000	413.601.540	73,46%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	338.434.000	262.115.218	77,45%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.430.000.000	14.997.409.640	97,20%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.054.824.600	10.023.776.952	90,67%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.616.623.300	17.147.492.096	92,11%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.975.350.000	2.905.000.000	97,64%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.734.520.000	4.329.500.000	91,45%
	Pengadaan Mebel	1.570.732.000	1.545.450.000	98,39%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.758.219.200	4.366.176.509	91,76%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.130.000.000	875.096.250	77,44%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.447.802.100	3.126.269.337	90,67%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.625.439.330	24.026.367.998	93,76%
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	3.137.266.500	2.594.797.196	82,71%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.488.172.830	21.431.570.802	95,30%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.768.301.660	9.315.729.512	72,96%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.661.312.700	1.246.730.236	75,04%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.431.988.960	2.891.044.464	53,22%
	Pemeliharaan Mebel	150.000.000	148.157.250	98,77%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000.000	850.008.919	85,00%
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000	25.000.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000.000	2.485.733.300	99,43%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000	1.669.055.343	83,45%
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.120.527.851	1.959.310.831	92,40%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	242.909.000	94.553.164	38,93%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	399.357.000	386.496.419	96,78%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.478.261.851	1.478.261.248	100,00%
9	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.678.000.000	2.176.175.029	81,26%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.558.000.000	1.217.440.144	78,14%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.000.000.000	838.744.995	83,87%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	120.000.000	119.989.890	99,99%
10	Penataan Organisasi	789.945.300	624.852.683	79,10%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	140.000.000	91.480.395	65,34%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	256.349.800	206.156.695	80,42%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	74.999.700	17.003.641	22,67%
	Monitoring. Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	181.990.700	179.713.125	98,75%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	136.605.100	130.498.827	95,53%
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.271.647.400	2.108.204.363	92,81%
	Fasilitasi Keprotokolan	670.000.000	614.249.590	91,68%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	712.499.400	682.717.260	95,82%
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	889.148.000	811.237.513	91,24%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	56.249.166.250	50.046.138.823	88,97%
12	Administrasi Tata Pemerintahan	16.674.330.450	15.177.853.526	91,03%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	11.520.779.000	10.999.098.019	95,47%
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2.690.212.350	2.368.023.477	88,02%
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2.463.339.100	1.810.732.030	73,51%
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	31.297.465.400	27.276.034.622	87,15%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	29.269.929.000	25.414.929.472	86,83%
	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.927.536.400	1.773.233.775	91,99%
	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	100.000.000	87.871.375	87,87%
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.488.345.800	2.116.124.513	85,04%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	550.000.000	477.822.424	86,88%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	688.345.800	502.467.481	73,00%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1.250.000.000	1.135.834.608	90,87%
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	5.789.024.600	5.476.126.162	94,59%
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5.539.024.750	5.303.372.492	95,75%
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	249.999.850	172.753.670	69,10%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.895.145.300	2.890.560.674	74,21%
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	805.998.800	494.530.802	61,36%
	Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	506.000.000	215.139.896	42,52%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	99.998.800	86.932.301	86,93%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	200.000.000	192.458.605	96,23%
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.714.146.500	1.205.912.885	70,35%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	238.457.500	188.276.031	78,96%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	600.326.500	210.062.503	34,99%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	875.362.500	807.574.351	92,26%
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.375.000.000	1.190.116.987	86,55%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	300.000.000	254.175.751	84,73%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	375.000.000	356.328.373	95,02%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	700.000.000	579.612.863	82,80%
TOTAL		203.861.494.966	181.265.930.250	88,92%

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 ditarik kesimpulan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2023 terdapat 3 (Tiga) Sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja yang dicapai oleh instansi pemerintah atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. LKjIP disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Good Governance atau Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) Sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran 1

Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan Rasio Realisasi Capaian Kinerja mencapai 96.88% atau Kriteria Sangat Tinggi.

b. Pencapaian Sasaran 2

Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 3 buah indikator kinerja yaitu Skor LPPD Kota Balikpapan, Presentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti, dan Presentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi dengan rata rata realisasi Capaian Kinerja mencapai 118.09% atau Kriteria Sangat Tinggi.

c. Pencapaian Sasaran 3

Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas 3 indikator kinerja yaitu nilai inflasi daerah, nilai indeks tata Kelola pengadaan, dan presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan dengan rata rata rasio capaian realisasi mencapai 93,41% atau Kriteria Sangat Tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis beserta 7 (tujuh) indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menunjukkan trend yang baik untuk mencapai target akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yaitu dengan rata rata capaian kinerja seluruhnya adalah 104.48% atau Kategori Sangat Tinggi. Hal ini menjadi preseden baik dalam kelanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja tahun berikutnya. Walaupun demikian masih terdapat beberapa indikator sub kegiatan yang capaiannya belum memenuhi target yang diharapkan sehingga perlu mendapat perhatian sebagai perbaikan dan peningkatan hasil untuk periode berikutnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Indikator Kinerja Utama Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023, terpenuhi sesuai dengan harapan. Namun demikian, segala kekurangan dan ketidaksempurnaan haruslah menjadi arah untuk perbaikan yang lebih baik kedepannya.

2. SARAN

Menghadapi tantangan dan hambatan seperti yang telah disebutkan di atas maka upaya upaya strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah ke depan adalah:

- a. Penguatan koordinasi antar Bagian
 - 1) Dengan melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi antar Bagian yang terintegrasi dalam urusan pembahasan isu isu strategis yang menjadi bagian dari tupoksi menjadi sebuah kesatuan visi dan pemahaman terkait capaian target sasaran Kepala Perangkat Daerah dengan koordinasi dibawah arahan Asisten sebagai pengampu program.
 - 2) Perlunya sinergi dan kolaborasi atas penerjemahan visi dalam pelaksanaan tugas serta pemahaman atas hasil koordinasi yang telah disepakati bersama terhadap implementasi di lapangan.
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia
 - 1) Perlunya dilaksanakan program Pembinaan, kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan metode atau sistem pembelajaran yang reformatif yang disesuaikan dengan tuntutan kondisi perubahan dan kebutuhan beban kerja yang menuntut inovasi dan kreativitas.
 - 2) Pembinaan mental spiritual aparatur Pemerintah Daerah.
 - 3) Penambahan Personil Pegawai dengan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan untuk menunjang percepatan pelaksanaan kegiatan melalui mutasi pegawai atau penambahan pegawai baru.
- c. Terhadap upaya peningkatan capaian indikator kinerja, agar dilakukan monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai koordinasi dalam penghimpunan data dan pembagian informasi secara efektif. Untuk Indikator Kinerja yang belum berorientasi hasil/ *outcomes* maka perlu diadakan reuiu bersamaan dengan reuiu berkala sebagai bahan evaluasi penetapan indikator kinerja perencanaan pembangunan berikutnya.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

